

French Interregnum in the Dutch East Indies (1800-1811): Towards a Historiographical Recognition

Taufan Daniarta Sukarno^{a*}

^aBadan Riset dan Inovasi Nasional, Pusat Arkeologi Lingkungan, Maritim,
dan Budaya Berkelanjutan, Jakarta Pusat, Indonesia

*taufands@gmail.com

Abstract

The period between 1800 and 1811 in Indonesian history is often treated merely as a transitional phase, sandwiched between the collapse of the Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) and the British occupation of Java. As a result, this phase is frequently reduced to a brief backdrop for the policies of certain figures or merely a prelude to the subsequent colonial administration. This article argues that this period should be understood as the French Interregnum—a hiatus in colonial rule significantly shaped by post-Revolutionary French political and ideological dynamics, even in the absence of direct French colonization in the Dutch East Indies. This article employs a historiographical approach and an analysis of colonial historical literature, examining the interregnum of French rule over Indonesia and its differences from the VOC regime and British administration. This article also emphasizes the importance of this period in the formation of the modern colonial state in the Dutch East Indies, particularly in terms of the centralization of power, militarization, and the rationalization of administration. By positioning the French Interregnum as a historical period with its own logic and dynamics, this article aims to promote a more balanced historiographical recognition in the writing of Indonesian history.

Keywords: French Interregnum, Dutch East Indies, Historiography, Colonial, Indonesian History

Masa Interregnum Prancis di Hindia Belanda (1800–1811): Menuju Pengakuan Historiografis

Abstrak

Periode antara tahun 1800–1811 dalam sejarah Indonesia sering diperlakukan sebagai masa peralihan semata, terjepit di antara runtuhnya Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan pendudukan Inggris di Jawa. Akibatnya, fase ini kerap direduksi menjadi latar singkat bagi kebijakan tokoh tertentu atau sekadar pengantar menuju pemerintahan kolonial berikutnya. Artikel ini mengajukan argumen bahwa periode tersebut perlu dipahami sebagai *French Interregnum*, yakni suatu masa jeda kekuasaan kolonial yang dibentuk secara signifikan oleh dinamika politik dan ideologis Prancis pasca-Revolusi, meskipun tanpa kolonisasi langsung oleh Prancis di Hindia Belanda. Artikel ini menggunakan pendekatan historiografis dan analisis literatur sejarah kolonial, dengan membahas masa jeda penguasaan Perancis atas Indonesia serta perbedaannya dengan rezim VOC dan administrasi Inggris. Artikel ini juga menekankan pentingnya periode tersebut dalam pembentukan negara kolonial modern di Hindia Belanda, khususnya dalam hal sentralisasi kekuasaan, militerisasi, dan rasionalisasi administrasi. Dengan menempatkan *French Interregnum* sebagai periode historis yang memiliki logika dan dinamika tersendiri,

artikel ini bertujuan mendorong pengakuan historiografis yang lebih proporsional dalam penulisan sejarah Indonesia.

Kata Kunci: French Interregnum, Hindia Belanda, Historiografi, Kolonial, Sejarah Indonesia

Pendahuluan

Dalam pengajaran dan penulisan Sejarah Indonesia, masa colonial umumnya disajikan dalam kerangka periodisasi yang relatif sederhana. Penjajahan Belanda sering dibagi ke dalam dua fase besar, yakni masa Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) sejak penaklukan Batavia pada awal abad ke-17 hingga kebangkrutannya pada tahun 1799, dan masa pemerintahan kolonial Belanda sebagai negara sejak awal abad ke-19 hingga berakhirnya kekuasaan kolonial pada tahun 1942. Di antara kedua fase tersebut, periode awal abad ke-19 kerap diperlakukan sebagai rangkaian transisi singkat: pemerintahan Belanda di bawah Herman Willem Daendels (1808–1811), disusul oleh pendudukan Inggris di Jawa (1811–1816) di bawah Thomas Stamford Raffles, sebelum Belanda kembali berkuasa secara penuh.

Skema periodisasi semacam ini, meskipun praktis, menyisakan persoalan konseptual yang penting. Secara khusus, periode 1800–1811 hampir selalu dilekatkan pada label “pemerintahan Belanda”, seolah-olah terjadi kesinambungan langsung antara VOC dan negara kolonial Belanda modern. Padahal, secara politik dan hukum internasional, konteks Eropa pada masa tersebut menunjukkan situasi yang jauh lebih kompleks. Setelah runtuhnya Republik Belanda lama dan berdirinya Republik Bataaf, wilayah Belanda berada di bawah pengaruh dominan Prancis, yang kemudian mengkristal dalam bentuk Kerajaan Holland sebagai negara klien Kekaisaran Prancis di bawah Napoleon Bonaparte. Dalam konfigurasi inilah Hindia Belanda dijalankan, bukan sebagai koloni negara Belanda yang merdeka, melainkan sebagai bagian dari orbit kekuasaan Prancis.

Artikel ini mengajukan argumen bahwa periode 1800–1811 perlu dipahami dan diperlakukan sebagai *French Interregnum* di Hindia Belanda, yakni suatu masa jeda kekuasaan kolonial ketika Prancis, secara de jure, memegang kendali atas wilayah kolonial Belanda melalui mekanisme negara klien dan pemerintahan perantara. Meskipun tidak terjadi kolonisasi langsung oleh Prancis dan administrasi sehari-hari tetap dijalankan oleh pejabat Belanda, legitimasi kekuasaan kolonial pada periode ini bersumber dari otoritas politik Prancis. Kebijakan-kebijakan utama yang diterapkan di Jawa—terutama pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels—harus dipahami dalam kerangka kepentingan strategis dan ideologis Kekaisaran Prancis, bukan semata-mata sebagai kelanjutan tradisi kolonial Belanda sebelumnya.

Dengan meresmikan istilah *French Interregnum*, artikel ini tidak bermaksud menggantikan keseluruhan narasi sejarah kolonial Indonesia, melainkan menawarkan penyempurnaan periodisasi yang lebih akurat secara historiografis. Pengakuan terhadap periode 1800–1811 sebagai fase tersendiri memungkinkan kita melihat perubahan penting dalam karakter negara kolonial, termasuk sentralisasi kekuasaan, militerisasi wilayah, dan penerapan prinsip-prinsip pemerintahan modern yang berakar pada pengalaman Revolusi Prancis dan era Napoleon. Dengan demikian, *French Interregnum* layak dicatat sebagai bagian integral dari sejarah Indonesia, bukan sekadar catatan kaki di antara VOC dan pemerintahan Inggris.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian historiografis. Fokus utama penelitian bukan pada rekonstruksi peristiwa secara kronologis semata, melainkan pada analisis cara periode

1800–1811 dipahami, diklasifikasikan, dan diposisikan dalam penulisan serta pengajaran sejarah Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini menitikberatkan pada persoalan periodisasi, konsep kekuasaan kolonial, dan legitimasi historiografis dari apa yang dalam artikel ini disebut sebagai *French Interregnum*.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber sekunder berupa buku teks sejarah Indonesia, karya historiografi kolonial, serta literatur akademik yang membahas konteks Eropa pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, khususnya terkait Revolusi Prancis, Republik Bataaf, Kerajaan Holland, dan kekuasaan Napoleon Bonaparte. Literatur tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi bagaimana periode awal abad ke-19 di Hindia Belanda selama ini direpresentasikan, serta sejauh mana pengaruh Prancis diakui atau justru diabaikan dalam narasi sejarah arus utama.

Analisis dilakukan melalui pembacaan kritis terhadap narasi sejarah yang ada, dengan membandingkan konteks politik dan hukum di Eropa dengan praktik pemerintahan kolonial di Hindia Belanda. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara label periodisasi yang lazim digunakan dengan realitas kekuasaan kolonial pada periode 1800–1811. Dengan cara ini, artikel ini berupaya menunjukkan adanya kesenjangan konseptual antara praktik historiografi dan dinamika politik kolonial yang sesungguhnya.

Melalui metode historiografis ini, penelitian tidak bermaksud menggantikan keseluruhan narasi sejarah kolonial Indonesia, melainkan menawarkan penajaman konseptual dan alternatif periodisasi yang lebih akurat. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong diskusi lebih lanjut mengenai pentingnya *French Interregnum* sebagai periode historis tersendiri dalam sejarah Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

1. Latar Sejarah Eropa dan Hindia Belanda (1789-1799)

Perubahan besar yang terjadi di Hindia Belanda pada awal abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik di Eropa pada akhir abad ke-18. Revolusi Prancis yang meletus pada tahun 1789 menandai runtuhnya tatanan monarki lama dan melahirkan prinsip-prinsip politik baru yang menekankan kedaulatan rakyat, rasionalisasi pemerintahan, serta restrukturisasi negara modern (Schama, 1989; Doyle, 2001). Revolusi ini tidak hanya mengubah struktur politik Prancis, tetapi juga memicu gelombang transformasi politik di berbagai wilayah Eropa, termasuk Belanda.

Di Belanda, ketegangan politik telah berkembang sejak dekade 1780-an antara kelompok Oranye yang mendukung kekuasaan Stadtholder dan kaum Patriot yang terinspirasi oleh gagasan Revolusi Prancis (Israel, 1995). Konflik ini mencapai titik balik pada tahun 1795 ketika pasukan Prancis memasuki wilayah Belanda dan mendukung pembentukan Republik Bataaf. Peristiwa ini mengakhiri Republik Belanda lama dan menempatkan Belanda dalam posisi sebagai negara sekutu sekaligus negara yang berada di bawah pengaruh politik dan militer Prancis (Schama, 1977; Israel, 1995). Sejak saat itu, kebijakan luar negeri dan pertahanan Belanda tidak lagi sepenuhnya independen, melainkan terikat pada kepentingan strategis Prancis dalam konteks perang-perang Eropa.

Perubahan rezim di Eropa tersebut berlangsung bersamaan dengan krisis mendalam yang dialami oleh Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). Sejak paruh kedua abad ke-18, VOC menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari praktik korupsi internal, beban utang yang terus meningkat, hingga menurunnya daya saing dalam perdagangan global akibat perubahan ekonomi dunia dan konflik bersenjata di Eropa (Gaastra, 2003; Blussé, 2015). Perang-perang Revolusioner Prancis turut memperburuk kondisi ini dengan mengganggu jalur pelayaran dan melemahkan kemampuan VOC untuk mempertahankan wilayah kolonialnya di Asia.

Krisis tersebut mencapai puncaknya pada tahun 1799, ketika VOC secara resmi dibubarkan dan seluruh aset, wilayah, serta kewenangan administratifnya diambil alih oleh negara (Gaastra, 2003). Pembubaran VOC menandai berakhirnya model kolonial berbasis perusahaan dagang dan membuka jalan bagi pembentukan pemerintahan kolonial yang lebih terpusat di bawah kendali negara. Namun, negara yang mewarisi kekuasaan kolonial tersebut bukanlah Belanda yang berdaulat sepenuhnya, melainkan Republik Bataaf yang secara politik berada dalam orbit kekuasaan Prancis (Ricklefs, 2008).

Dengan demikian, sejak akhir dekade 1790-an, Hindia Belanda berada dalam situasi transisional yang khas. Kekuasaan kolonial tidak lagi dijalankan oleh VOC, sementara negara yang menggantikannya berada di bawah pengaruh langsung Prancis. Konstelasi inilah yang menjadi fondasi historis bagi munculnya *French Interregnum* pada awal abad ke-19, ketika kebijakan kolonial di Hindia Belanda semakin mencerminkan kepentingan dan logika politik Prancis pasca-Revolusi.

2. Republik Bataaf, Transisi Kekuasaan, dan Integrasi ke dalam Kekaisaran Prancis (1800-1807)

Setelah pembubaran VOC pada tahun 1799, kekuasaan kolonial di Hindia Belanda secara resmi beralih ke negara melalui Republik Bataaf. Namun, peralihan ini terjadi dalam konteks Eropa yang masih bergejolak akibat perang-perang Revolusioner Prancis. Sejak awal berdirinya, Republik Bataaf bukanlah negara yang sepenuhnya merdeka, melainkan sekutu dekat sekaligus negara yang berada di bawah pengaruh politik dan militer Prancis (Schama, 1977; Israel, 1995). Kondisi ini memiliki implikasi langsung terhadap status dan pengelolaan wilayah kolonialnya, termasuk Hindia Belanda.

Pada periode 1800–1804, ketika Napoleon Bonaparte menjabat sebagai Konsul Pertama Prancis, perhatian utama pemerintah Prancis tertuju pada konsolidasi kekuasaan di Eropa dan menghadapi Inggris sebagai musuh utama. Dalam kerangka ini, koloni-koloni Belanda dipandang terutama sebagai aset strategis yang harus diamankan dari kemungkinan jatuh ke tangan Inggris, sekaligus sebagai sumber daya yang dapat mendukung kepentingan geopolitik Prancis (Broers, 2014). Instruksi dan kebijakan yang berkaitan dengan Hindia Belanda pada masa ini lebih bersifat strategis-militer ketimbang administratif, dengan penekanan pada pertahanan wilayah dan loyalitas pemerintahan kolonial terhadap Prancis melalui Republik Bataaf.

Situasi tersebut berubah secara signifikan setelah Napoleon memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Transformasi Republik Prancis menjadi Kekaisaran Prancis menandai fase baru dalam ekspansi pengaruh Napoleon, termasuk terhadap negara-negara sekutunya. Republik Bataaf semakin terintegrasi ke dalam sistem kekuasaan Prancis, baik secara politik, ekonomi, maupun militer. Integrasi ini

mencapai bentuk yang lebih formal pada tahun 1806, ketika Republik Bataaf dibubarkan dan digantikan oleh Kerajaan Holland yang dipimpin oleh Louis Bonaparte, saudara Napoleon (Israel, 1995; Broers, 2014).

Dalam konteks kolonial, perubahan ini menegaskan bahwa Hindia Belanda berada di bawah otoritas Prancis secara *de jure*, meskipun administrasi sehari-hari tetap dijalankan oleh pejabat Belanda. Kebijakan kolonial pada masa ini tidak dapat dilepaskan dari kepentingan Kekaisaran Prancis, khususnya dalam menghadapi blokade Inggris dan mempertahankan jaringan kolonial dari serangan musuh. Dengan demikian, Hindia Belanda pada periode awal abad ke-19 bukan lagi sekadar koloni Belanda, melainkan bagian dari sistem kekaisaran yang lebih luas yang dikendalikan dari Paris.

Sementara itu, kondisi di Hindia Belanda antara tahun 1800–1807 ditandai oleh situasi transisional dan lemahnya kontrol administratif. Setelah VOC dibubarkan, pemerintahan kolonial menghadapi keterbatasan sumber daya, kekurangan personel, serta ketidakpastian arah kebijakan dari Eropa (Ricklefs, 2008). Komunikasi yang lambat dan kondisi perang di Eropa membuat pemerintah kolonial di Batavia sering kali harus mengambil keputusan pragmatis untuk mempertahankan stabilitas lokal, tanpa arahan yang jelas dari pusat kekuasaan.

Kelemahan struktural ini membuat Hindia Belanda berada dalam posisi rentan terhadap ancaman Inggris, sekaligus memperlihatkan kebutuhan akan reformasi kolonial yang lebih terpusat dan efektif. Situasi inilah yang kemudian mendorong Kekaisaran Prancis, melalui pemerintahan perantaranya di Belanda, untuk mengambil langkah-langkah lebih tegas dalam mengonsolidasikan kekuasaan kolonial. Dengan demikian, periode 1800–1807 dapat dipahami sebagai fase awal *French Interregnum*, ketika Hindia Belanda secara formal berada dalam orbit kekuasaan Prancis, meskipun belum sepenuhnya mengalami restrukturisasi kolonial secara menyeluruh.

3. Herman Willem Daendels dan Implementasi Kekuasaan Prancis di Hindia Belanda (1808-1811)

Pengangkatan Herman Willem Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1808 merupakan titik balik penting dalam sejarah kolonial Indonesia awal abad ke-19. Penunjukan ini tidak dapat dipisahkan dari konteks integrasi penuh Belanda ke dalam sistem kekuasaan Kekaisaran Prancis. Pada saat itu, Kerajaan Holland berada di bawah pemerintahan Louis Bonaparte, saudara Napoleon, dan secara politik tunduk pada kepentingan strategis Kekaisaran Prancis (Israel, 1995; Broers, 2014). Dalam kerangka ini, Daendels dikirim ke Jawa bukan semata-mata sebagai administrator kolonial Belanda, melainkan sebagai pelaksana mandat kekuasaan Prancis di wilayah kolonial yang sangat rentan terhadap ancaman Inggris.

Daendels merupakan figur yang memiliki latar belakang militer dan ideologis yang kuat dalam tradisi Revolusi Prancis. Ia pernah terlibat langsung dalam perang-perang revolusioner dan dikenal sebagai pendukung setia Napoleon Bonaparte. Statusnya sebagai *marshal* dan kedekatannya dengan pusat kekuasaan di Eropa menegaskan bahwa otoritas yang dimilikinya di Hindia Belanda bersumber dari legitimasi politik Prancis, bukan dari kedaulatan Belanda sebagai negara merdeka (Schama, 1977; Ricklefs, 2008). Dengan

demikian, pemerintahan Daendels merepresentasikan fase ketika kekuasaan kolonial di Hindia Belanda dijalankan secara de jure dalam orbit Kekaisaran Prancis.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan Daendels mencerminkan secara jelas karakter negara Napoleonik. Prioritas utama pemerintahannya adalah penguatan pertahanan koloni dalam menghadapi ancaman Inggris, yang diwujudkan melalui militerisasi wilayah, pembangunan infrastruktur strategis seperti Jalan Raya Pos, serta restrukturisasi administrasi kolonial agar lebih terpusat dan efisien (Carey, 1984; Ricklefs, 2008). Langkah-langkah ini menunjukkan pergeseran mendasar dari model kolonial VOC yang berbasis perdagangan menuju model negara kolonial modern yang berorientasi pada kontrol teritorial dan kepentingan geopolitik.

Reformasi administratif yang dilakukan Daendels juga mencerminkan pengaruh prinsip-prinsip pemerintahan pasca-Revolusi Prancis, termasuk rasionalisasi birokrasi, pembatasan kekuasaan elite lokal tertentu, serta penegasan otoritas negara kolonial atas wilayah dan penduduknya. Meskipun banyak kebijakan Daendels menimbulkan resistensi dan kontroversi, baik di kalangan elite lokal maupun pejabat kolonial sendiri, reformasi tersebut memperlihatkan upaya sistematis untuk membangun pemerintahan kolonial yang selaras dengan logika kekuasaan Kekaisaran Prancis (Carey, 2007).

Dengan demikian, periode pemerintahan Daendels antara tahun 1808–1811 merupakan fase paling konkret dari *French Interregnum* di Hindia Belanda. Pada masa inilah pengaruh Prancis tidak hanya hadir secara de jure melalui struktur politik di Eropa, tetapi juga terwujud secara nyata dalam praktik pemerintahan kolonial sehari-hari. Daendels berperan sebagai penghubung langsung antara kepentingan Kekaisaran Prancis dan realitas kolonial di Indonesia, menjadikan periode ini sebagai bukti paling jelas bahwa kekuasaan Prancis atas Hindia Belanda bukan sekadar konseptual, melainkan operasional.

Arus Waktu (Timeline) Periodisasi Penjajahan di Nusantara



Fase masa jeda Perancis

Republik Bataaf (1800-1807) - Masa Transisi dan peralihan - Pergantian Gubernur Jenderal	Daendels - Janssens (1808-1811) - Sentralisasi administrasi - Reformasi birokrasi - Pembangunan Infrastruktur - Penguatan militer
--	---

Gambar 1. Ilustrasi arus waktu periodisasi penjajahan di Nusantara

Signifikansi bagi Penulisan Sejarah Indonesia

Kekalahan Gubernur Jenderal Jan Willem Janssens oleh pasukan Inggris di Jawa pada tahun 1811 menandai berakhirnya masa pengaruh Prancis secara langsung di Hindia Belanda. Kapitulasi yang terjadi setelah jatuhnya Batavia dan pertempuran di sekitar Semarang–Jatingaleh bukan semata peristiwa militer, melainkan titik penutup dari sebuah fase transisi politik yang dimulai sejak Republik Bataaf mengambil alih kendali atas wilayah kolonial Belanda pada akhir abad ke-18 (Carey, 1986; Ricklefs, 2008). Dengan berakhirnya pemerintahan Janssens, proyek kolonial yang beroperasi di bawah bayang-bayang Revolusi Prancis dan ekspansi Napoleon secara formal dihentikan, sekaligus membuka jalan bagi pendudukan Inggris dan kemudian restorasi kekuasaan Belanda pasca-1816 (Fasseur, 1992).

Dalam historiografi Indonesia, periode Prancis di Hindia Belanda kerap diperlakukan sebagai episode singkat dan periferal, seolah hanya jeda di antara dua rezim kolonial yang “lebih penting”: VOC dan pemerintah kolonial Belanda abad ke-19. Padahal, pendekatan semacam ini cenderung mengaburkan makna struktural dari masa transisi tersebut. Pemerintahan Republik Bataaf dan terutama era Herman Willem Daendels memperkenalkan paradigma baru dalam pengelolaan koloni, yang menandai pergeseran dari logika korporasi dagang VOC menuju negara kolonial modern yang terpusat, militeristik, dan administratif (Schulte Nordholt, 2011; Cribb, 2014).

Signifikansi utama periode ini terletak pada proses rasionalisasi kekuasaan kolonial. Reformasi yang dijalankan Daendels—mulai dari reorganisasi birokrasi, pembangunan infrastruktur jalan raya, penataan ulang pertahanan, hingga pembatasan kekuasaan elite lokal—mencerminkan penerapan prinsip-prinsip negara modern yang berkembang di Eropa pasca-Revolusi Prancis (Bosma & Raben, 2008; Furnivall, 1944). Meskipun banyak kebijakan tersebut bersifat koersif dan menimbulkan penderitaan bagi penduduk lokal, secara struktural ia membentuk fondasi bagi sistem pemerintahan kolonial yang lebih terintegrasi pada abad ke-19. Dalam konteks ini, masa Prancis bukanlah anomali, melainkan laboratorium awal bagi negara kolonial Hindia Belanda (Fasseur, 1992).

Dari sudut pandang historiografi, periode 1800–1811 juga penting karena menantang narasi kontinuitas kolonial yang terlalu linier. Kehadiran Prancis memperlihatkan bahwa kolonialisme di Nusantara tidak semata produk nasionalisme Belanda, melainkan bagian dari dinamika geopolitik global Eropa pada era perang revolusioner dan Napoleonik (Bayly, 2004; Roberts, 2014). Hindia Belanda menjadi ruang kontestasi kekuasaan imperium, tempat gagasan-gagasan tentang republik, sentralisasi negara, dan militerisasi wilayah diterjemahkan ke dalam praktik kolonial. Dengan demikian, sejarah Indonesia pada awal abad ke-19 perlu dipahami sebagai bagian dari sejarah global, bukan sekadar pinggir dari konflik Eropa (Ricklefs, 2008).

Penulisan ini juga mendukung beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti artikel dari Sumantri (2025) yang berjudul *‘French Interregnum : Periode Kekuasaan Perancis di Hindia Belanda (1806-1811)’*, namun dengan penambahan argumentasi dan arus waktu yang terjadi selama kekosongan kekuasaan akibat konflik di Eropa. Oleh karena itu, memahami periode jeda penguasaan Prancis di Nusantara bukan hanya soal mengisi celah kronologis, tetapi juga membaca asal-usul negara kolonial modern yang kelak membentuk sejarah Indonesia hingga abad ke-20.

Simpulan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa French Interregnum (1800–1811), atau masa jeda penguasaan Prancis di Nusantara, merupakan periode ketika Prancis menjalankan kekuasaan kolonialnya di Indonesia secara langsung dan tidak langsung, melalui struktur administrasi dan aparat kolonial Belanda yang berada di bawah kendali politik Kekaisaran Prancis. Periode ini tidak dapat direduksi sebagai episode sementara atau penyimpangan dalam sejarah kolonial Indonesia. Fase ini menandai momen transformasi dari rezim korporasi VOC menuju negara kolonial modern yang terpusat dan birokratis. Secara historiografis, pemahaman yang lebih luas atas periode Prancis menantang narasi eksisting yang sudah umum diajarkan sejak era kemerdekaan, serta mengoreksi beberapa poin penting yang dahulu disimplifikasi. Dalam konteks Indonesia modern, masa jeda penguasaan Perancis ini perlu mendapatkan rekognisi yang lebih layak, khususnya dalam ranah pendidikan didalam ruang-ruang kelas. Karena dalam beberapa hal, warisan yang ditinggalkan ternyata menjadi landasan bagi Indonesia modern saat ini.

Daftar Pustaka

- Bayly, C. A. (2004). *The birth of the modern world, 1780–1914: Global connections and comparisons*. Oxford: Blackwell Publishing.
- Blussé, L. (2015). *Visible Cities: Canton, Nagasaki, and Batavia and the Coming of the Americans*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Bosma, U., & Raben, R. (2008). *Being “Dutch” in the Indies: A history of creolisation and empire, 1500–1920*. Singapore: NUS Press.
- Broers, M. (2014). *Napoleon: Soldier of Destiny*. London: Faber & Faber.
- Carey, P. (1984). “Changing Javanese Perceptions of the Colonial State.” *Indonesia*, 38, 1–18.
- Carey, P. (2007). *The Power of Prophecy: Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785–1855*. Leiden: KITLV Press.
- Cribb, R. (2014). *Historical atlas of Indonesia* (2nd ed.). Honolulu: University of Hawai‘i Press.
- Doyle, W. (2001). *The Oxford History of the French Revolution*. Oxford: Oxford University Press.
- Elson, R. E. (2008). *The idea of Indonesia: A history*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Fasseur, C. (1992). *The politics of colonial exploitation: Java, the Dutch, and the cultivation system*. Ithaca: Cornell University Press.
- Furnivall, J. S. (1944). *Netherlands India: A study of plural economy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Gaastra, F. S. (2003). *The Dutch East India Company: Expansion and Decline*. Zutphen: Walburg Pers.
- Israel, J. I. (1995). *The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477–1806*. Oxford: Oxford University Press.
- Ricklefs, M. C. (2008). *A History of Modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). Basingstoke: Palgrave Macmillan.
- Roberts, A. (2014). *Napoleon the Great*. London: Penguin Books.

- Schama, S. (1977). *Patriots and Liberators: Revolution in the Netherlands 1780–1813*. New York: Vintage Books.
- Schama, S. (1989). *Citizens: A Chronicle of the French Revolution*. New York: Vintage Books.
- Schulte Nordholt, H. (2011). *Modernity and cultural citizenship in the Netherlands Indies: An illustrated hypothesis*. Leiden: KITLV Press.
- Sumantri, Tb. N. A. (2025). *French Interregnum : Periode Kekuasaan Perancis di Hindia Belanda (1806-1811)*. Jurnal Historical Cenderawasih, **2** (1): 32-40.